

INDONESIA EMAS 2045

Strategi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Yusriani Sapta Dewi, Edi Siregar, Kiki Kusumawati, Prionggo Hendradi
Nurhayati, Dwi Ernaningsih, Riena F.Telussa, Urip Rahmani

Indonesia Emas 2045

Strategi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

**Yusriani Sapta Dewi, Edi Siregar, Kiki Kusumawati,
Prionggo Hendradi, Nurhayati, Dwi Ernarningsih,
Riena F.Telussa, Urip Rahmani**



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

INDONESIA EMAS 2045
Strategi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Copyright @ 2026 By Yusriani Sapta Dewi, dkk

All right reserved

Penulis

Yusriani Sapta Dewi

Edi Siregar

Kiki Kusumawati

Prionggo Hendradi

Nurhayati

Dwi Ernarningsih

Riena F.Telussa

Urip Rahmani

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Yusriani Sapta Dewi

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-259-0

Cetakan ke-1, Maret 2026

17 x 25 cm, viii + 225 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi
buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA



Dr. Sihar P.H. Sitorus, B.S.B.A., M.B.A

Buku Indonesia Emas 2045: Strategi Menuju Masa Depan Berkelanjutan hadir pada saat yang tepat. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, refleksi atas relasi antara manusia, alam, dan teknologi bukan lagi pilihan intelektual, melainkan kebutuhan peradaban.

Relasi ketiganya hari ini berada dalam ketegangan. Di satu sisi, potensi alam terus tergerus oleh eksploitasi yang tidak selalu mempertimbangkan keberlanjutan. Di sisi lain, teknologi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan mulai mengambil alih berbagai fungsi dan peran manusia. Dalam konteks inilah pertanyaan mendasar muncul: bagaimana memastikan bahwa kemajuan tidak mengorbankan kemanusiaan, dan bahwa inovasi tidak menjauhkan kita dari keseimbangan ekologis?

Konsep *green economy*, *blue economy*, dan *digital economy* dalam kerangka tantangan *middle income trap* serta momentum bonus demografi Indonesia menjadi ruang kontestasi sekaligus ruang refleksi. Ketiganya menuntut perubahan alam pikir, cara kita memahami apa itu cukup, apa itu kecukupan, dan bagaimana bangsa ini berkompetisi dalam pengelolaan sumber daya tanpa kehilangan arah keberlanjutan.

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target demografis atau proyeksi ekonomi. Ia adalah panggilan untuk membangun harmoni antara produktivitas, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Harmoni

tersebut tidak dapat dicapai melalui pendekatan tunggal, melainkan melalui dialog lintas disiplin dan kolaborasi keilmuan yang saling melengkapi.

Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), sebagai institusi pendidikan tinggi dengan keragaman disiplin ilmu, memandang buku ini sebagai cerminan dari semangat multidisiplin yang menjadi fondasi akademik kami. Pertanyaan-pertanyaan besar yang diangkat dalam buku ini—tentang keberlanjutan, teknologi, ekonomi, dan kemanusiaan—meneguhkan pentingnya integrasi perspektif dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USNI.

Buku ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi membentuk kesadaran intelektual yang mampu membaca arah zaman dan merumuskan jawaban atas tantangan masa depan.

Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dosen penulis serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku penting ini. Semoga karya ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi langkah kolektif menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2026

Rektor Universitas Satya Negara Indonesia



Dr. Sihar P.H. Sitorus, B.S.B.A., M.B.A



PRAKATA

Visi Indonesia Emas 2045 bukan semata proyeksi pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik pembangunan, melainkan sebuah cita-cita peradaban. Di dalamnya terkandung harapan akan terwujudnya bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan bangsa yang mampu memajukan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan kelestarian alam, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemanusiaan, bukan sekadar alat efisiensi.

Buku ini disusun atas kesadaran bahwa tantangan pembangunan abad ke-21 bersifat kompleks dan saling terkait. Manusia ditempatkan sebagai subjek dan tujuan pembangunan bukan sekadar objek kebijakan. Alam dipahami bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai sistem kehidupan yang memiliki batas, nilai, dan hak untuk dijaga keberlanjutannya. Sementara itu, teknologi diposisikan sebagai *enabler* strategis yang harus diarahkan secara etis, inklusif, dan berwawasan ekologis agar benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi manusia, alam, dan teknologi menjadi benang merah utama yang dirajut dalam setiap pembahasan buku ini.

Melalui perspektif multidisiplin, buku ini mengulas berbagai aspek penting pembangunan Indonesia Emas 2045, mulai dari UMKM, generasi muda, lingkungan hidup, sistem informasi dan digitalisasi, ekonomi berkelanjutan, pertanian, ketahanan pangan, hingga kelautan dan sumber daya pesisir. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat satu pesan utama: bahwa masa depan Indonesia hanya dapat dibangun melalui strategi keselarasan antara kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan kelestarian ekosistem.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Namun besar harapan agar kehadirannya dapat menjadi referensi, bahan refleksi, sekaligus pemantik diskusi bagi akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045 sebuah Indonesia yang maju secara teknologi, tangguh secara ekologi, dan unggul dalam kualitas manusianya.

Semoga Bermanfaat

Penulis Buku

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA.....	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v

01.

INDONESIA EMAS 2045 : SEBUAH VISI	1
Latar Belakang Perjuangan Indonesia Menuju Kemerdekaan	2
Visi Indonesia Emas 2045	4
Sektor Penggerak (<i>Game Changers</i>)	7
Mengapa Visi Ini Sangat Relevan Dan Mendesak ?.....	10
Konvergensi Pembangunan Indonesia 2045.....	12
Pilar Konvergensi Pembangunan Indonesia 2045.....	13
Integrasi SDGs Dalam Konvergensi Pembangunan Indonesia	17
Tantangan Implementasi Konvergensi Pembangunan	19
Pustaka	21

02.

UMKM PENGGERAK EKONOMI MENUJU INDONESIA EMAS 2045. 25	
Pendahuluan	25
Konsep Dasar UMKM	28
Asas Dan Tujuan UMKM	29
Peran Strategis UMKM	32
UMKM Pilar Ekonomi Nasional	34
Tantangan Dan Hambatan UMKM.....	35
Persaingan Dan Peluang UMKM.....	37
Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian	40

Kesimpulan Dan Saran.....	44
Pustaka	47

03.

PERAN GENERASI MUDA DI ERA DIGITALISASI SEBAGAI KEKUATAN BANGSA MELALUI LITERASI DIGITAL MENUJU INDONESIA EMAS

2045	49
Literasi Digital Sebagai Fondasi Kecerdasan Bangsa	49
Etika Digital Dan Tanggung Jawab Sosial	56
Tantangan Literasi Digital Di Kalangan Muda Indonesia.....	58
Pustaka	66

04.

LITERASI DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 IMPLEMENTASI LINTAS

SEKTOR.....	69
Pendahuluan	69
Literasi Digital Dan <i>AI</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	71
Literasi Digital Dan <i>AI</i> Dalam Ekonomi Digital	72
Literasi Digital Dan <i>AI</i> Dalam Sektor Kesehatan	76
Literasi Digital Dan <i>AI</i> Dalam Sektor Kelautan & Lingkungan.....	79
Tantangan Dan Strategi.....	83
Pustaka	88

05.

GENERASI MUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM EKOSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045.....

Generasi Muda Sebagai Agen Perubahan	91
Ekosistem Teknologi Informasi: Dunia Yang Terhubung.....	95
Generasi Muda Dari Pengguna Menjadi Penggerak.....	98
Kiprah Anak Muda Indonesia Dalam Kancah Teknologi Global (Studi Kasus).....	100
Dampak Kiprah Anak Muda Terhadap Reputasi Indonesia	104

Etika Dan Kebijakan Digital Sebagai Karakter Bangsa.....	107
Mengapa <i>Roadmap</i> Kebijakan Diperlukan?	110
Pustaka	113

06.

INOVASI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN SEBAGAI STRATEGI DUKUNGAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045: TRANSFORMASI PENDIDIKAN DIGITAL UNTUK DAYA SAING BANGSA.....	115
Pendahuluan	115
Pendidikan Dan Tantangan Indonesia Emas 2045	118
Inovasi Sistem Informasi Pendidikan.....	120
Transformasi Pendidikan Digital Dan Daya Saing Bangsa	123
Peran SDM Dan Kelembagaan Pendidikan.....	127
Tantangan Dan Strategi Implementasi.....	129
Kesimpulan	132
Pustaka	133

07.

REKONSTRUKSI PERAN GENERASI Z DALAM TRANSFORMASI EKONOMI DAN EKOSISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN	135
Pendahuluan	135
Karakteristik Generasi Z Bidang Pertanian.....	137
Teknologi Dan Transformasi Pertanian	141
Ekonomi Dan Ekosistem Pertanian Berkelanjutan.....	148
Penutup.....	153
Pustaka	154

08.

INOVASI TEKNOLOGI PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA EMAS 2045	157
Pendahuluan	157
Inovasi Teknologi Dalam Perikanan Berkelanjutan.....	158
Tantangan Dan Arah Pengembangan	165

Menuju Indonesia Emas 2045.....	165
Penutup.....	165
Pustaka	166

09.

LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI FONDASI INDONESIA EMAS 2045: SDM UNGGUL, EKONOMI HIJAU, DAN Keadilan Ekologis 169

Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan.	182
Tantangan Lingkungan Hidup Menuju Indonesia Emas 2045.....	185
Sumber Daya Manusia Unggul Sebagai Pilar Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	188
Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Indonesia Emas 2045	191
Keadilan Ekologis Sebagai Prinsip Pembangunan	193
Integrasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional.....	196
Intisari	198
Pustaka	200

10.

VISI INDONESIA EMAS 2045 DAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN 205

Ketersediaan Pangan: Produksi Efisien Dan Tangguh Iklim	206
Aksesibilitas Pangan: Keadilan Sosial Dan Inklusi Teknologi	210
Stabilitas Pangan: Ketangguhan Sistem Dan Antisipasi Risiko.....	212
Pemanfaatan Pangan Berkelanjutan: Gizi, Kesehatan, Dan Lingkungan	214
Pertanian Presisi Sebagai Pengungkit Indonesia Emas.....	216
Pustaka	218

PROFIL PENULIS 221



INDONESIA EMAS 2045 : SEBUAH VISI

Yusriani Sapta Dewi

Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur tepat pada 100 tahun kemerdekaan. Visi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar kuat pada sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, memahami latar belakang sejarah Indonesia dalam perjalanan menuju kemerdekaan menjadi hal yang sangat penting sebagai landasan ideologis, moral, dan nasionalisme dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas.

LATAR BELAKANG PERJUANGAN INDONESIA MENUJU KEMERDEKAAN

Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan diwarnai oleh perjuangan panjang melawan penjajahan, tumbuhnya kesadaran nasional, serta lahirnya nilai-nilai persatuan dan semangat pengorbanan. Nilai-nilai inilah yang hingga kini relevan sebagai modal sosial dan karakter bangsa dalam membangun masa depan Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia menuju kemerdekaan adalah kisah yang membangkitkan semangat, diwarnai oleh perjuangan keras dan kerjasama antarbangsa untuk meraih cita-cita bersama. Pada saat ini, warisan perjuangan tersebut terus dihargai dan dijunjung tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia[1].

1. Masa Penjajahan dan Penderitaan Rakyat Indonesia

Sejarah penjajahan di Indonesia dimulai sejak kedatangan bangsa Barat, terutama Portugis dan Belanda, pada abad ke-16. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), kerja rodi, serta eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penderitaan rakyat dan keterbelakangan dalam berbagai bidang. Hal ini berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Pemerintahan ini dikendalikan oleh Belanda dan hanya sedikit peran yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam pengambilan keputusan politik[2].

Di balik penderitaan tersebut, tumbuh benih perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan rakyat, meskipun masih bersifat kedaerahan seperti Perang Diponegoro, Perang Pattimura, dan Perang Aceh, menunjukkan semangat juang dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan martabat bangsa. Semangat inilah yang kelak berkembang menjadi perjuangan nasional[3].

2. Kebangkitan Nasional dan Kesadaran Berbangsa

Awal abad ke-20 menandai lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi tonggak Kebangkitan Nasional. Organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Indonesia mulai menyuarakan persatuan, pendidikan, dan kemerdekaan. Puncak kesadaran nasional tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia[4]. Sumpah Pemuda (satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa) adalah cikal bakal identitas nasional yang mengikat keragaman menjadi satu kekuatan. Ini menjadi pondasi untuk membangun Indonesia yang kuat secara kolektif menuju emas 2045. Sumpah Pemuda membangkitkan nasionalisme dan tekad untuk merdeka; pemuda adalah motor penggerak kemerdekaan.

Nilai persatuan dan nasionalisme yang lahir dari Sumpah Pemuda menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan[5] dan relevan hingga kini dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas. Nilai toleransi, gotong royong, dan kebersamaan yang tertanam dalam semangat Sumpah Pemuda harus terus dipupuk agar Indonesia Emas tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga harmonis dan adil.

3. Pendudukan Jepang dan Momentum Menuju Kemerdekaan

Pendudukan Jepang (1942–1945) membawa perubahan signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah invasi Jepang ke Indonesia, terdapat kepentingan strategis yang mendasarinya. Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri militernya, terutama dalam produksi senjata dan amunisi selama Perang Dunia II. Selain itu, Jepang juga memanfaatkan tenaga kerja rakyat Indonesia, merekrut mereka sebagai prajurit melalui berbagai badan militer yang didirikan[6]. Meskipun Jepang juga melakukan penindasan, masa ini memberikan ruang bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk berperan dalam pemerintahan dan organisasi militer. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia secara luas semakin memperkuat identitas nasional.

Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan semakin terbuka. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia dan simbol lahirnya negara yang merdeka dan berdaulat.

4. Nilai-Nilai Perjuangan sebagai Fondasi Indonesia Emas

Perjalanan sejarah menuju kemerdekaan mengandung nilai-nilai luhur seperti nasionalisme, persatuan, gotong royong, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini merupakan modal penting dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai kunci utama Indonesia Emas.

Dengan memahami sejarah perjuangan bangsa, generasi muda diharapkan mampu meneladani semangat para pahlawan dalam menghadapi tantangan masa kini, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan persaingan internasional. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan sumber inspirasi untuk membangun masa depan bangsa.

Sejarah perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nilai-nilai perjuangan yang lahir dari masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan harus terus ditanamkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan sejarah sebagai pijakan, bangsa Indonesia dapat melangkah maju secara percaya diri menuju masa depan yang lebih gemilang.

VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan arah pembangunan jangka panjang nasional yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini dirancang sebagai respons terhadap peluang bonus demografi, kemajuan teknologi, serta tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disrupsi ekonomi. Secara ringkas, visi ini menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta berperan aktif dalam tatanan global[7].

1. Tujuan Utama (Visi Besar)

Tujuan utama dari visi ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan transformasi menyeluruh yang mencakup :

- Negara Maju dan Berdaya Saing: Mencapai pendapatan per kapita tinggi dan bersaing di kancah global.
- Keadilan dan Kemakmuran: Mewujudkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan kemiskinan ekstrem.
- Kedaulatan Nasional: Memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat di berbagai bidang.
- Pembangunan Berkelanjutan: Mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan memastikan pembangunan yang lestari.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang termaktub dalam :

- Pembangunan Manusia: Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); dengan focus pada kependudukan Pendidikan, Kesehatan, Penguasaan Iptek, Kebudayaan, Ketenagakerjaan
- Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan perdagangan Luar Negeri, Industri serta Ekonomi Kreatif dan Digital, Pariwisata, Maritim, Ketahanan Pangan Energi, dan Air serta Lingkungan
- Pemerataan Pembangunan: Menghapus kesenjangan antar wilayah (Indonesia Sentris). Fokus pada Pemerataan pendapatan, Pengentasan kemiskinan, Kesejahteraan petani, Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pemerataan infrastruktur
- Ketahanan Nasional & Tata Kelola: Pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwibawa di mata dunia. Fokus pada Politik Dalam Negeri, Reformasi birokrasi dan Kelembagaan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pertahanan dan Keamanan Politik Luar Negeri.

2. Target Ekonomi Menjadi Kekuatan Dunia

Indonesia menargetkan diri untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*) sebelum tahun 2045.

- Peringkat Ekonomi: Masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia (berdasarkan PDB).
- Pertumbuhan Ekonomi: Dibutuhkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6% hingga 7% setiap tahunnya.
- Struktur Ekonomi: Transformasi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju industri manufaktur bernilai tinggi (Hilirisasi) serta penguatan sektor jasa berbasis digital.

3. Target Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Pembangunan Manusia (SDM): Menciptakan SDM unggul melalui pendidikan merata (Rata-rata Lama Sekolah 12 tahun, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi¹ 60%), kesehatan meningkat, dan keahlian teknologi.
- Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan: Menekan angka kemiskinan mendekati 0%, mengurangi ketimpangan pendapatan (Gini Ratio 0.29-0.32)², dan pemerataan pembangunan wilayah.
- Ketahanan Sosial Budaya: Memperkuat modal sosial budaya, identitas bangsa, dan ketahanan keluarga/masyarakat menghadapi guncangan.
- Kepemimpinan Global: Penguatan diplomasi, peran aktif di forum internasional, serta pengaruh budaya Indonesia.
- Keberlanjutan Lingkungan: Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca³ menuju Net Zero Emission

¹ Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, sebuah indikator pendidikan yang mengukur proporsi penduduk yang kuliah (usia berapapun) dibandingkan dengan populasi usia kuliah yang seharusnya (biasanya 19-23/24 tahun), menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat di jenjang pendidikan tinggi, dan bisa lebih dari 100% karena mencakup siswa di luar usia standar.

² Gini ratio (rasio Gini) adalah ukuran statistik untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah, dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Nilai mendekati 0 berarti pendapatan semakin merata, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, di mana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar pendapatan

³ Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang terdapat di atmosfer bumi dan memiliki kemampuan untuk menyerap serta memancarkan radiasi inframerah. Proses ini dikenal sebagai efek rumah kaca, yang secara alami menjaga suhu permukaan bumi tetap stabil. Namun, ketika konsentrasi GRK meningkat secara berlebihan akibat aktivitas manusia, efek ini menjadi terlalu kuat dan menyebabkan pemanasan global.

4. Target Lingkungan

- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) : Mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) sebagai bagian dari komitmen global dan nasional.
- Keberlanjutan sumber Daya Alami : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang.
- Ketahanan Ekologi : Membangun masyarakat dan lingkungan yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
- Ekonomi Hijau : Menerapkan konsep ekonomi hijau yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekologi

5. Target Tata Kelola

Pilar utama tata kelola adalah:

- Regulasi dan institusi : Menciptakan sistem pemerintahan dan kelembagaan yang menghasilkan regulasi berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta menjamin supremasi hukum.
- Transformasi Digital: Mengoptimalkan teknologi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, termasuk dalam birokrasi pemerintahan.
- Stabilitas: Memperkuat stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional.
- Peningkatan Kualitas Aparatur: Meningkatkan kompetensi aparatur negara untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik

SEKTOR PENGGERAK (*Game Changers*)

Untuk mencapai target di atas, Indonesia mengandalkan tiga penggerak pertumbuhan baru yang saling terintegrasi:

1. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Model pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial, bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi risiko

lingkungan dan kelangkaan sumber daya, menjadikannya alternatif untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Konsep ini mengintegrasikan prinsip ekonomi dan ekologi untuk menciptakan solusi berkelanjutan melalui inovasi, kebijakan, dan investasi yang mendukung kelestarian alam serta keadilan sosial. Prinsip utama adalah a) Kesejahteraan & Keadilan di mana menciptakan kemakmuran bersama, mengurangi ketimpangan, serta memastikan kesetaraan antar generasi dan keadilan sosial; b) Efisiensi & Kecukupan dengan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta efisien dalam penggunaan sumber daya; c) Batasan Planet (*Planetary Boundaries*) untuk menjaga, memulihkan, dan berinvestasi pada alam, tidak melampaui batas ekologis bumi; d) Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) merupakan integrasi ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui kebijakan yang terpadu.

2. Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan, sambil menjaga kesehatan dan kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, dan transportasi laut, serta mengupayakan pengelolaan yang tidak merusak lingkungan. Prinsip Utama Ekonomi Biru adalah a) Berkelanjutan di mana pemanfaatan sumber daya laut harus tidak melebihi daya dukung lingkungan dan memastikan ketersediaannya untuk masa depan; b) Inklusif di mana manfaat ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk komunitas pesisir, dan membantu mengurangi kemiskinan; c) Pro-Ekosistem adalah kegiatan ekonomi dirancang untuk menjaga kualitas dan fungsi ekosistem laut, menghindari polusi dan kerusakan habitat

3. Ekonomi Digital

Merupakan kegiatan ekonomi berbasis teknologi digital (internet, AI) yang mengubah transaksi dari konvensional menjadi online, mencakup *e-commerce*, *fintech* (dompet digital, mobile banking, QRIS) transportasi *online*, konten digital, hingga *digital marketing*, yang mendorong efisiensi, memperluas pasar (terutama UMKM), menciptakan lapangan kerja baru, namun menghadapi tantangan keamanan data, literasi digital, dan kesenjangan akses teknologi. Prinsip Utama adalah a) Berasaskan Teknologi penerapan penggunaan internet, *cloud computing*, IoT, AI untuk aktivitas ekonomi; b) Intermediasi dengan menghilangkan perantara (disintermediation) dan menciptakan model bisnis baru (inovasi); c) Bentuk yang mencakup semua transaksi digital, dari belanja online di *marketplace* hingga layanan.

Menjadi kekuatan ekonomi dunia memerlukan stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan antar kepemimpinan[8]. Tantangan terbesarnya adalah kualitas sumberdaya manusia; tanpa tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi di bidang digital dan teknologi, target pendapatan per kapita setara negara maju akan sulit tercapai[9]. Tanpa lompatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sebuah negara berisiko terjebak dalam *Middle-Income Trap*. Kondisi ini terjadi ketika upah buruh naik namun produktivitas tetap rendah, sehingga kehilangan daya saing terhadap negara berbiaya rendah, namun belum mampu bersaing dengan negara maju di sektor inovasi. Keberlanjutan kebijakan harus diarahkan pada pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas (sumber daya alam) menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*)[10]. Hilirisasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan di antaranya adalah Kemandirian Teknologi artinya menjadi konsumen teknologi saja tidak cukup; negara harus mampu memproduksi teknologi sendiri (R&D); selain itu Literasi digital artinya bukan sekadar bisa menggunakan gawai, melainkan kemampuan dalam *coding*, analisis data besar (*big data*), dan kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi di semua sektor industri.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni memerlukan ekosistem yang mendukung, yang terdiri dari tiga pilar utama yang

pertama, Revitalisasi Pendidikan dengan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri masa depan (*link and match*); yang kedua Kesehatan Publik di mana kualitas intelektual dimulai dari gizi yang baik dan akses kesehatan yang merata untuk memastikan produktivitas jangka panjang. Selain daripada itu yang ketiga adalah Kepastian Hukum di mana stabilitas politik menciptakan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modal pada proyek-proyek riset yang bersifat jangka panjang. Stabilitas politik adalah fondasi, kesinambungan kebijakan adalah jalurnya, dan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mesin penggeraknya. Jika salah satu unsur ini timpang, visi menjadi kekuatan ekonomi dunia hanya akan menjadi retorika tanpa eksekusi yang nyata.

MENGAPA VISI INI SANGAT RELEVAN DAN MENDESAK ?

Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target angka di atas kertas, melainkan sebuah keharusan strategis. Relevansi dan urgensinya muncul karena Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan sejarah yang tidak akan terulang kembali.

Berikut adalah alasan mengapa visi ini sangat relevan dan mendesak:

1. Memanfaatkan Momentum Bonus Demografi

Indonesia saat ini sedang berada di puncak Bonus Demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif[11].

- Relevansi: Ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang dahsyat jika dikelola dengan benar.
- Urgensi: Jendela peluang ini akan mulai tertutup setelah tahun 2035 seiring dengan penuaan populasi. Jika kita tidak menjadi negara maju sebelum penduduk kita menua, kita akan terjebak dalam kemiskinan permanen.

2. Menghindari "*Middle-Income Trap*"

Banyak negara berkembang tertahan di level pendapatan menengah selama puluhan tahun tanpa pernah naik kelas menjadi negara maju[12].

- Relevansi: Indonesia telah berada di status pendapatan menengah selama lebih dari 30 tahun.
- Urgensi: Untuk menjadi negara maju pada 2045, Pendapatan Domestik Bruto kita harus tumbuh konsisten di atas 6%. Jika kita kehilangan momentum sekarang, biaya untuk mengejar ketertinggalan di masa depan akan jauh lebih mahal dan sulit.

3. Pergeseran Geopolitik dan Ekonomi Global

Dunia sedang mengalami pergeseran pusat ekonomi dari Barat ke Asia (Abad Asia).

- Relevansi: Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki posisi tawar strategis dalam rantai pasok global (terutama nikel untuk baterai *Electric Vehicle*⁴ dan semikonduktor).
- Urgensi: Jika Indonesia tidak segera memperkuat fondasi industri dan digitalnya, kita hanya akan menjadi pasar bagi produk asing, bukan menjadi pemain utama atau pemimpin di kawasan.

4. Krisis Iklim dan Sumber Daya

Dunia sedang bertransformasi menuju ekonomi hijau dan biru.

- Relevansi: Indonesia adalah paru-paru dunia dan pemegang kunci biodiversitas laut. Visi Indonesia Emas mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan kemajuan ekonomi[13].
- Urgensi: Dampak perubahan iklim seperti kenaikan air laut sangat mengancam wilayah kepulauan kita. Menunda transisi ke ekonomi

⁴ Baterai EV (*Electric Vehicle*) adalah sistem penyimpanan energi listrik isi ulang berkapasitas besar, biasanya berbasis Lithium ion yang berfungsi sebagai sumber daya utama untuk menggerakkan motor listrik pada kendaraan listrik murni, menggantikan mesin pembakaran internal. Baterai ini terdiri dari ribuan sel yang dikelompokkan menjadi modul dan paket baterai besar, mengubah energi kimia menjadi listrik saat digunakan dan sebaliknya saat diisi ulang, menentukan jangkauan dan performa mobil.

berkelanjutan berarti membiarkan aset sumber daya rusak secara permanen[14].

5. Akselerasi Revolusi Digital

Teknologi digital tidak lagi menjadi pendukung, melainkan fondasi seluruh sektor.

- Relevansi: Digitalisasi dapat memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi pangan melalui *smart farming*, dan menghubungkan pulau-pulau melalui ekonomi digital[15].
- Urgensi: Kesenjangan digital (*digital divide*) harus segera diatasi. Jika tidak segera dilakukan, masyarakat di daerah terpencil akan semakin tertinggal dari kemajuan global[16][17].

Visi Indonesia Emas menjadi mendesak karena kita sedang berpacu dengan waktu. Kegagalan mengeksekusi visi ini dalam dua dekade ke depan bukan hanya berarti kita gagal menjadi negara maju, tetapi berisiko menghadapi krisis sosial-ekonomi akibat beban populasi yang menua tanpa dukungan finansial yang kuat.

KONVERGENSI PEMBANGUNAN INDONESIA 2045

Pemerintah Indonesia menetapkan visi *Indonesia Emas 2045* sebagai arah strategis pembangunan jangka panjang dengan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, berdaya saing global, serta memiliki kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Dinamika global seperti perubahan iklim, krisis energi, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta disrupsi teknologi menghadirkan tantangan besar[18]. Oleh karena itu, pembangunan menuju Indonesia Emas tidak dapat ditempuh dengan pendekatan *business as usual*. Pembangunan harus dirancang secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan[19]. Dalam konteks ini, konvergensi pembangunan menjadi pendekatan kunci untuk memastikan bahwa berbagai agenda pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memperkuat dan menghasilkan dampak yang optimal.

Konvergensi pembangunan merujuk pada proses penyelarasan visi, kebijakan, instrumen, dan aktor pembangunan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Secara teoretis, konvergensi pembangunan berakar pada konsep *integrated development, whole-of-government approach*, dan pembangunan berkelanjutan[20]. Artinya konvergensi pembangunan menyelaraskan:

- Sektor pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, teknologi),
- Level pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa),
- Aktor pembangunan (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan komunitas),
- Waktu dan kebijakan (perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang).

Dalam perspektif kebijakan publik, konvergensi menuntut integrasi lintas sektor, sinkronisasi lintas level pemerintahan, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan. Sementara itu, dalam perspektif lingkungan hidup, konvergensi menegaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi batas ekologis pembangunan yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, konvergensi pembangunan Indonesia 2045 harus dipahami sebagai orkestrasi kebijakan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan secara simultan.

PILAR KONVERGENSI PEMBANGUNAN INDONESIA 2045

1. Konvergensi Pembangunan Manusia dan Ekonomi

Konvergensi Pembangunan Manusia dan Ekonomi adalah proses di mana wilayah yang lebih miskin atau kurang berkembang secara bertahap "mengejar" ketertinggalan mereka dari wilayah yang lebih maju, baik dalam hal pendapatan per kapita (ekonomi) maupun kualitas hidup (manusia), melalui pertumbuhan yang lebih cepat[21]. Ini melibatkan penyempitan kesenjangan (dispersi) indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) antar daerah dari waktu ke waktu, menunjukkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

Pembangunan manusia unggul menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang[22]. Konvergensi diwujudkan melalui:

- Integrasi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,
- Penguatan *link and match* antara pendidikan vokasi dan industri,
- Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

Bonus demografi Indonesia harus dikonversi menjadi bonus produktivitas, bukan sekadar bonus jumlah penduduk usia kerja[23]. Secara sederhana, konvergensi ini adalah target di mana kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup tidak hanya terjadi di pusat-pusat kemakmuran, tetapi juga menyebar dan merata ke daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Pertumbuhan ekonomi tinggi harus dibarengi dengan jaminan sosial yang kuat. Konvergensi ini memastikan bahwa masyarakat di kelas ekonomi bawah memiliki akses yang sama terhadap modal, teknologi, dan pasar sehingga mereka tidak tertinggal oleh kemajuan industri.

2. Konvergensi Ekonomi dan Lingkungan

Hubungan ekonomi dan lingkungan adalah saling mempengaruhi di mana keduanya memiliki hubungan yang mutlak; pembangunan ekonomi tinggi yang tidak ramah lingkungan akan merusak lingkungan, sementara lingkungan yang baik mendukung pembangunan yang berkualitas[24]. Namun demikian pertumbuhan ekonomi seringkali meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan polusi, sementara kendala lingkungan dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang.

Lingkungan hidup merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan[25]. Perubahan iklim, degradasi lahan, krisis air, dan persoalan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Konvergensi pembangunan menuntut agar prinsip-prinsip perlindungan lingkungan diarusutamakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur,

industrialisasi, dan pengembangan wilayah. Pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan Indonesia 2045 tetap berada dalam batas ekologis.

Konvergensi ekonomi dan lingkungan merujuk pada upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, di mana pembangunan ekonomi tidak lagi mengorbankan sumber daya alam, bahkan bisa meningkatkan kualitas lingkungan, seringkali diukur dengan indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)⁵ untuk melihat apakah wilayah tertinggal bisa "mengejar" ketertinggalan kualitasnya melalui kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya dari sisi pendapatan, dengan tantangan bahwa kendala lingkungan dapat memperlambat laju konvergensi ekonomi. Konsep utama konvergensi dalam konteks lingkungan adalah adaptasi konvergensi ekonomi yaitu mengambil konsep konvergensi ekonomi (pengejaran ketertinggalan pendapatan) dan menerapkannya pada variabel lingkungan. Tujuannya adalah agar wilayah miskin secara lingkungan bisa mengejar wilayah maju secara lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan konvergensi antara:

- Industrialisasi dan prinsip ekonomi hijau,
- Transisi energi dan penciptaan lapangan kerja hijau,
- Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan.

Pendekatan ini mendorong pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi sirkular dan rendah karbon[26].

3. Konvergensi Pembangunan Wilayah

Konvergensi Pembangunan Wilayah adalah proses mengecilnya kesenjangan ekonomi dan pendapatan antar wilayah, di mana daerah yang lebih tertinggal tumbuh lebih cepat untuk menyusul daerah yang lebih maju, menciptakan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang melalui investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi lokal yang sinergis. Konsep ini muncul dari teori

⁵ IKLH adalah singkatan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu alat ukur komposit untuk menilai kondisi lingkungan di suatu wilayah dengan menggabungkan beberapa indikator penting seperti kualitas udara (IKU), kualitas air (IKA), dan tutupan lahan (IKTL), yang berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah.

pertumbuhan ekonomi neoklasik[27], dengan jenis utama *sigma convergence* (mengukur penyebaran pendapatan) dan *beta convergence* (mengukur kemampuan wilayah miskin mengejar yang kaya), yang penting untuk mengurangi ketimpangan dan pemerataan pembangunan di suatu negara, seperti di Indonesia. Ketimpangan antar wilayah masih menjadi tantangan utama. Konvergensi pembangunan wilayah dilakukan melalui:

- Penguatan konektivitas fisik dan digital,
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa,
- Integrasi pembangunan desa, kota, dan kawasan perdesaan.

Pembangunan wilayah berbasis potensi lokal menjadi kunci pemerataan dan ketahanan nasional[28].

4. Konvergensi Tata Kelola dan Inovasi Digital

Konvergensi tata kelola dan inovasi digital adalah penyatuan strategi, proses, dan teknologi untuk mengelola transformasi digital secara efektif[29], memastikan inovasi digital (seperti AI, *metaverse*) berjalan selaras dengan tujuan bisnis dan regulasi, melalui tata kelola yang kuat (misalnya, tata kelola data, keamanan siber, etika) guna mencapai hasil yang terintegrasi, aman, dan akuntabel. Ini menciptakan sinergi antara pengembangan teknologi baru dan kerangka kerja pengelolaannya agar adaptif, tidak menghambat, dan memberikan nilai maksimal.

Transformasi digital berperan sebagai *enabler* konvergensi pembangunan[30]. Hal ini mencakup:

- Integrasi data lintas sektor dan lintas lembaga,
- Digitalisasi pelayanan publik,
- Penguatan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).

Tata kelola yang adaptif, transparan, dan kolaboratif menjadi prasyarat utama keberhasilan konvergensi[31].

5. Konvergensi Kebijakan Publik

Konvergensi kebijakan publik adalah pendekatan penyatuan dan koordinasi berbagai kebijakan serta program dari sektor berbeda[32]

(kesehatan, pangan, pendidikan, dll.) agar bekerja sama secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti *stunting*, menciptakan efisiensi, dan dampak yang lebih besar, menghindari fragmentasi kebijakan menjadi satu kerangka kerja yang terpadu dan sinergis. Ini melibatkan kolaborasi lintas sektoral, integrasi data, serta instrumen koordinasi yang kuat untuk memastikan tujuan bersama tercapai secara efektif.

Keberhasilan konvergensi pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik dan sistem perencanaan pembangunan. Sinkronisasi antara RPJPN 2025–2045, RPJMN, dan RPJMD menjadi prasyarat agar agenda nasional dan daerah berjalan seiring. Selain itu, penguatan perencanaan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), reformasi birokrasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam mewujudkan konvergensi kebijakan.

INTEGRASI SDGs DALAM KONVERGENSI PEMBANGUNAN INDONESIA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyediakan kerangka global yang relevan untuk mendorong konvergensi pembangunan Indonesia 2045. Integrasi SDGs ke dalam kebijakan nasional dan daerah dapat memperkuat keterpaduan antara agenda sosial, ekonomi, dan lingkungan[33]. Integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam konvergensi pembangunan Indonesia dilakukan dengan menyelaraskan 17 tujuan global tersebut ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan di tingkat daerah.

Konvergensi pembangunan yang selaras dengan SDGs akan memastikan bahwa pencapaian Indonesia Emas tidak hanya diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), berperan sentral dalam mengkoordinasikan dan mengarusutamakan 17 tujuan SDGs ke dalam kerangka pembangunan nasional.

Mekanisme integrasi SDGs dalam konvergensi pembangunan meliputi : a) Penyelarasan Kebijakan di mana target dan indikator SDGs diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah (Rencana Aksi Nasional/Daerah SDGs); b) Pelibatan Multi Pihak di mana proses ini bersifat inklusif, melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan media, sesuai prinsip "tanpa meninggalkan siapa pun" (*no one left behind*); c) Pelaporan Global di mana secara rutin Indonesia melaporkan kemajuan pencapaian SDGs melalui *Voluntary National Review* (VNR)⁶ di forum PBB, menunjukkan komitmen dan transparansi; d) Pendanaan Inovatif di mana Pemerintah mendorong sumber pendanaan yang beragam, untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Integrasi ini mendorong konvergensi pembangunan di tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan dampaknya secara bersamaan. Contoh nyata konvergensi ini antara lain Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi melalui Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan jaminan kesehatan universal (UHC)⁷ digalakkan untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan dan kehidupan sehat (SDGs 1 dan SDGs 3). Green Development dan Rendah Karbon merupakan strategi transisi ekonomi hijau, termasuk restorasi gambut dan substitusi bahan bakar rendah karbon, diimplementasikan untuk tujuan lingkungan (SDGs 13). Implementasi SDGs juga didorong hingga ke tingkat desa, dengan memanfaatkan teknologi seperti

⁶ VNR, atau Voluntary National Review (Tinjauan Nasional Sukarela), adalah laporan sukarela yang dibuat oleh negara anggota PBB untuk melaporkan kemajuan, tantangan, dan pencapaian implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat nasional, yang disampaikan dalam forum internasional seperti High-Level Political Forum (HLPF) PBB setiap tahunnya. Laporan ini menjadi mekanisme pemantauan Agenda 2030 untuk berbagi pengalaman, memperkuat data dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi global

⁷ Jaminan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC) adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk mendapatkan akses ke layanan kesehatan berkualitas (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) secara adil dan merata, tanpa mengalami kesulitan keuangan saat mengakses layanan tersebut. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai skema kepesertaan, termasuk iuran mandiri dan subsidi bagi yang tidak mampu.

kecerdasan buatan untuk pemetaan kerentanan sosial-ekonomi dan intervensi yang lebih tepat sasaran (SDGs 10).

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan (sekitar 62,5% dari indikator SDGs berada di jalur yang benar, beberapa tantangan masih ada, di antaranya a) Percepatan Pencapaian, hal ini mengingat waktu yang tersisa menuju 2030 memerlukan tindakan cepat dan strategis untuk mengejar ketertinggalan pada beberapa indikator yang stagnan atau memburuk; b) Kesenjangan Data dan Pembangunan yang muncul karena keterbatasan data di tingkat daerah dan kesenjangan pembangunan antar wilayah menjadi hambatan dalam implementasi yang merata; c) Pemanfaatan Teknologi misalnya penggunaan teknologi *frontier* seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* membuka peluang baru untuk monitoring yang lebih tepat sasaran dan efisien, terutama di tingkat desa.

TANTANGAN IMPLEMENTASI KONVERGENSI PEMBANGUNAN

Meskipun secara konseptual konvergensi pembangunan memiliki keunggulan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, antara lain ego sektoral, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan.

1. Tantangan Koordinasi dan Kelembagaan

- **Koordinasi Lintas Sektor:** Kementerian/lembaga, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah seringkali bekerja secara sektoral, tidak terintegrasi sepenuhnya, dan berjalan sendiri-sendiri.
- **Kurangnya Integrasi:** Program di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi, meskipun ada upaya sinergi.
- **Pedoman Teknis:** Belum tersedianya juklak/juknis yang jelas dan dipahami semua pihak memperlambat pelaksanaan di lapangan.

2. Tantangan Anggaran dan Sumber Daya

- **Fragmentasi Anggaran:** Dana untuk program konvergensi tersebar di banyak kementerian/lembaga, sehingga sulit untuk disinergikan.
- **Keterbatasan Pendanaan:** Ketergantungan pada hibah dan kebutuhan pendanaan stabil untuk fasilitas pendukung konvergensi menjadi tantangan.

3. Tantangan Data, Monitoring, dan Evaluasi

- **Sistem Data Terintegrasi:** Sistem manajemen data dan monitoring yang belum baik menyulitkan evaluasi cakupan sasaran secara menyeluruh.
- **Analisis Situasi:** Analisis situasi stunting yang kurang mendalam pada beberapa daerah.

4. Tantangan Wilayah dan Sosial

- **Ketimpangan Wilayah:** Kesenjangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi antarwilayah (Jawa vs. luar Jawa) memperparah isu konvergensi.
- **Perilaku Masyarakat:** Pola asuh yang salah dan pemanfaatan sumber gizi yang kurang optimal (misal: masyarakat pesisir tidak memanfaatkan protein laut) menjadi hambatan perilaku.

5. Tantangan Implementasi Program (Contoh Stunting)

- **Kurangnya Inovasi:** Pelaksanaan program pencegahan stunting spesifik berjalan 'business as usual' tanpa inovasi berarti.
- **Fokus pada Intervensi:** Belum optimalnya integrasi intervensi sensitif (lintas sektor) dengan intervensi spesifik (kesehatan).

Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen politik yang kuat, kepemimpinan visioner, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Konvergensi pembangunan Indonesia 2045 merupakan pendekatan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan multidimensi menuju Indonesia Emas. Dengan menempatkan lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kebijakan publik yang terintegrasi,

Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan kualitas Indonesia pada satu abad kemerdekaannya.

PUSTAKA

- [1] R. F. M. Fahmi, S. L. Nurpadilah, S. R. Sudrajat, and R. N. Syamsi, "Propaganda intelektual Indische Partij:: Strategi Media Dan Pendidikan Dalam Membangkitkan Kesadaran Nasional (1912--1925)," *KRONIK: Journal of History Education and Historiography*, vol. 9, no. 1, pp. 1–18, 2025.
- [2] M. Musliati, C. Aulia, and E. Erwinsyah, "Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan," *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 2, pp. 104–116, 2023.
- [3] H. Siri, "Sejarah Pergerakan Nasional." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- [4] W. Iryana, Sejarah pergerakan nasional: melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Prenada Media, 2022.
- [5] C. R. Firdaus and M. Mahyadi, "Sumpah Pemuda: Sejarah, Makna, dan Relevansinya dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* vol. 2, no. 3, pp. 5931–5934, 2025.
- [6] S. Rut, D. Zalukhu, D. Nazwa, and R. Sinaga, "Pendudukan Jepang di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 6, pp. 9371–9382, 2024.
- [7] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Visi Indonesia Emas." Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2019, [Online]. Available: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Dokumen_lengkap_2045_final.pdf.
- [8] A. Likhotal, "Global leadership in the 21st century.," *Cadmus*, 2020.
- [9] A. H. Fuady, "Teknologi digital dan ketimpangan ekonomi di Indonesia," *Masyarakat Indonesia*, vol. 44, no. 1, pp. 75–88, 2018.
- [10] S. Urmetzer, M. P. Schlaile, K. B. Bogner, M. Mueller, and A. Pyka,

- "Exploring the dedicated knowledge base of a transformation towards a sustainable bioeconomy," *Sustainability*, vol. 10, no. 6, p. 1694, 2018.
- [11] E. J. Nuriman, R. Hidayat, A. Setiabudi, and M. P. Dewi, "Bonus Demografi: Peluang atau Tantangan Bagi Kemajuan Indonesia di Tahun 2045," *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, vol. 8, no. 1, pp. 149–161, 2025.
 - [12] H. Kharas and H. Kohli, "What is the middle income trap, why do countries fall into it, and how can it be avoided?," *Global journal of emerging market economies*, vol. 3, no. 3, pp. 281–289, 2011.
 - [13] C. Agus, "Integrated bio-cycles system for sustainable and productive tropical natural resources management in Indonesia," in *Bioeconomy for sustainable development*, Springer, 2019, pp. 201–216.
 - [14] R. E. Kasperson and J. X. Kasperson, "Climate change, vulnerability and social justice," in *Social contours of risk*, Routledge, 2012, pp. 301–321.
 - [15] T. Ceccarelli *et al.*, "Leveraging automation and digitalization for precision agriculture: Evidence from the case studies," 2022.
 - [16] M. Nurohmah and others, "Akuntabilitas Publik Era Digital di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, vol. 1, no. 2, pp. 85–97, 2025.
 - [17] M. Gurstein, "Effective use: A community informatics strategy beyond the digital divide," *First Monday*, 2003.
 - [18] H. U. Sverdrup, "The global sustainability challenges in the future: The energy use, materials supply, pollution, climate change and inequality nexus," in *What Next for Sustainable Development?*, Edward Elgar Publishing, 2019, pp. 49–75.
 - [19] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Penduduk berkualitas menuju Indonesia emas." Bappenas, 2023.
 - [20] L. Dubé, N. A. Addy, C. Blouin, and N. Drager, "From policy coherence to 21st century convergence: A whole-of-society paradigm of human and economic development," *Annals of the New York Academy of Sciences* vol. 1331, no. 1, pp. 201–215, 2014.

- [21] D. Rahmayani, A. N. Nihayah, M. A. Rachman, and A. C. T. Rosalia, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Aplikasi, dan Kajian Empiris*. Penerbit NEM, 2025.
- [22] G. Ranis, "Human development and economic growth," 2004.
- [23] D. Andriani and T. Yustini, "Anticipating the demographic bonus from the perspective of human capital in Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science*, vol. 10, no. 6, pp. 141–152, 2021.
- [24] A. G. Awan and others, "Relationship between environment and sustainable economic development: A theoretical approach to environmental problems," *International Journal of Asian Social Science* vol. 3, no. 3, pp. 741–761, 2013.
- [25] M. E. Gherasim and G. Tanase, "The fundamentals of sustainable development," *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, vol. 4, no. 1, p. 446, 2012.
- [26] J.N. O. Bonsu, "Towards a circular and low-carbon economy: Insights from the transitioning to electric vehicles and net zero economy," *Journal of Cleaner Production*, vol. 256, p. 120659, 2020.
- [27] R. M. Solow, "Neoclassical growth theory," *RM Solow - Handbook of macroeconomics*, vol. 1, pp. 637–667, 1999.
- [28] C. Kakderi and A. Tasopoulou, "Regional economic resilience: the role of national and regional policies," *European Planning Studies*, vol. 25, no. 8, pp. 1435–1453, 2017.
- [29] A. Thomas, "Convergence and digital fusion lead to competitive differentiation," *Business Process Management Journal*, vol. 26, no. 3, pp. 707–720, 2020.
- [30] E. N. Evdokimova, M. V. Kupriyanova, I. P. Solovyova, and I. P. Simikova, "Enablers and Barriers of Digital Transformations Industry: A Study of Regional Development," in *Unlocking Digital Transformation of Agricultural Enterprises: Technology Advances, Digital Ecosystems, and Innovative Firm Governance*, Springer, 2023, pp. 95–104.
- [31] C. Wyborn, "Co-productive governance: a relational framework for adaptive governance," *Global Environmental Change*, vol. 30, pp.

- 56–67, 2015.
- [32] P. Trein, I. Meyer, and M. Maggetti, "The integration and coordination of public policies: A systematic comparative review," *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, vol. 21, no. 4, pp. 332–349, 2019.
- [33] J. Tosun and J. Leininger, "Governing the interlinkages between the sustainable development goals: Approaches to attain policy integration," *Global challenges*, vol. 1, no. 9, p. 1700036, 2017.

PROFIL PENULIS



Dwi Ernaningsih, Doktor di bidang Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap dan Magister Sains dalam bidang Teknologi Kelautan dari IPB University; merupakan dosen tetap di program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Satya Negara Indonesia. Aktif mengajar berbagai mata kuliah seperti, Dasar Ilmu Perikanan, Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Analisis Sistem

dan Kebijakan Perikanan Tangkap. Berperan aktif dalam seminar dan diskusi pada forum ilmiah tentang perikanan dan kelautan. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai evaluator pengelola perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*). Banyak terlibat dalam berbagai Hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari Kemendiktisaintek, khususnya yang berfokus pada ilmu perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.



Edi Siregar, Doktor di bidang Manajemen Pendidikan, dosen tetap Universitas Satya Negara Indonesia, dan menjadi dosen luar biasa di dua Kampus lainnya di Jakarta. Penulis selain mengajar pada jenjang S_1 mengajar juga di jenjang Pascasarjana S_2 . Selain mengampu matakuliah utama Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis dipercayakan juga mengajar matakuliah

Kewirausahaan, Kepemimpinan, Pengembangan Diri, Desain Kurikulum, Evaluasi Program Pendidikan, Teori Pendidikan dan Pengajaran, Bisnis, Etika Pengembangan Diri, Etika Bisnis, Pendidikan Pancasila, Hubungan Industrial dan Teori Organisasi. Menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan narasumber tetap The Alpha YES untuk Program Pemuda Advent Televisi Hope Channel Indonesia.



Kiki Kusumawati merupakan akademisi di bidang Sistem Informasi yang memiliki ketertarikan kuat pada persimpangan antara teknologi digital, etika, dan pembangunan manusia. Aktivitas keilmuannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis teknologi, tetapi juga pada dampak sosial, perilaku, dan nilai-nilai yang menyertainya dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 2004 hingga saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik khususnya Program Pendidikan Strata-1 Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia, mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan Sistem Informasi, Etika Bisnis dan Profesi, Literasi Digital, serta Kecakapan Antar Personal.

Penulis merupakan Magister di bidang Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma. Minat riset penulis mencakup transformasi digital, kesiapan teknologi organisasi, *smart campus*, pemasaran digital, serta isu etika dan tata kelola dalam pemanfaatan teknologi informasi. Aktif mengembangkan bahan ajar yang adaptif terhadap perubahan zaman, dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami. Buku ketiga ini lahir dari refleksi panjang penulis atas dinamika perkembangan teknologi dan tantangan moral yang menyertainya. Harapannya, karya ini dapat menjadi referensi, inspirasi, sekaligus pengingat bahwa kemajuan digital sejati bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kualitas nilai kemanusiaan yang dijaga di dalamnya.



Nurhayati, merupakan akademisi Magister Sains Teknologi Industri Pertanian dari IPB University. Mulai Tahun 1994 hingga sekarang mengajar di USNI (Universitas Satya Negara Indonesia) Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan. Aktif sebagai pelatih dalam kegiatan UMKM tentang alih inovasi produksi bersih singkong dan pemanfaatannya menuju ekonomi hijau (kripik kaca, kripik kulit singkong), pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin wangi, permen sehat dari daun kelor, melatih pembuatan *body scrub* mengandung kolagen dari kulit telur. Aktif dalam forum ilmiah terkait teknik lingkungan dan kegiatan Hibah dari Kemendiktisaintek. Pengurus Pusat IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia) periode Tahun 2018-2022.



Prionggo Hendradi, merupakan Doktor Manajemen Pendidikan dari Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan dari Universitas Islam Nusantara Bandung dan Magister Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma. Minat penulis adalah melakukan penelitian meliputi Desain Sistem Informasi dengan pembuktian sering lolos hibah penelitian dari BIMA sebagai ketua peneliti maupun ketua PkM. Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Selain itu penulis juga bekerja sebagai dosen di beberapa universitas di Indonesia. Matakuliah yang diampu oleh penulis diantaranya Pengantar Teknologi Informasi, Pengantar IOT, Konsep Sistem Informasi, Analisa & Perancangan Sistem Informasi, Sistem Basis Data, Manajemen Proyek Sistem Informasi, Manajemen Hubungan Pelanggan, Knowledge Management, Technopreneurship, Sistem Informasi SDM, dan Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Telah menghasilkan buku yang berjudul “. & Implementasi Sistem Informasi”,

tulisan di beberapa buku Monograf atau *Book Chapter* dalam mendukung program pemerintah



Riena F. Telussa, merupakan Magister Sains di bidang Perikanan dengan fokus pada Teknologi perikanan tangkap dari IPB University. Menjadi dosen Aparatur Sipil Negara di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Satya Negara Indonesia; dengan mengampu mata kuliah Ikhtiologi, Teknologi Penangkapan ikan, dan Tingkah Laku Ikan. Aktif dalam kegiatan forum ilmiah terkait perikanan dan kelautan. Juga terlibat dalam berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya yang berfokus pada ilmu perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.



Urip Rahmani, Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dan Magister Sains dalam bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari IPB University. Saat ini menjadi dosen Aparatur Sipil Negara di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Satya Negara Indonesia. Aktif mengajar berbagai mata kuliah seperti Dasar Ilmu Perikanan, Ekonomi Perikanan, Perencanaan Bisnis Perikanan, Ekowisata Perairan, Sosiologi Perikanan, Rantai Pasok Perikanan. Berperan aktif dalam kegiatan forum ilmiah terkait perikanan dan kelautan.



Yusriani Sapta Dewi, Guru Besar di bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Menjadi Dosen Aparatur Sipil Negara di Universitas Satya Negara Indonesia, Penguji dan Telaah Naskah Disertasi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Lingkungan dan PKLH. Aktif dalam Seminar-seminar Nasional dan Internasional tentang Kependudukan, Perubahan Iklim, Konservasi

Lingkungan dan *Sustainable Development Goals*. Aktif pula menulis dalam jurnal, baik nasional maupun internasional. Ketertarikannya pada kearifan lokal masyarakat Indonesia mendorongnya untuk bergabung di Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB) suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Pilar Lingkungan, Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat terutama Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara, suatu gerakan perempuan yang mempunyai harapan ke depan mengembalikan kehijauan Indonesia dan meningkatkan taraf hidup bangsa berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bercita-cita mendirikan Sekolah Perempuan di lingkungan marginal dan daerah slum yang akan meningkatkan derajat perempuan terutama di bidang pengetahuan dan keterampilan.

Visi Indonesia Emas 2045 bukan semata proyeksi pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik pembangunan, melainkan sebuah cita-cita peradaban. Di dalamnya terkandung harapan akan terwujudnya bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan bangsa yang mampu memajukan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan kelestarian alam, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemanusiaan, bukan sekadar alat efisiensi.

Buku ini disusun atas kesadaran bahwa tantangan pembangunan abad ke-21 bersifat kompleks dan saling terkait. Manusia ditempatkan sebagai subjek dan tujuan pembangunan bukan sekadar objek kebijakan. Alam dipahami bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai sistem kehidupan yang memiliki batas, nilai, dan hak untuk dijaga keberlanjutannya. Sementara itu, teknologi diposisikan sebagai enabler strategis yang harus diarahkan secara etis, inklusif, dan berwawasan ekologis agar benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi manusia, alam, dan teknologi menjadi benang merah utama yang dirajut dalam setiap pembahasan buku ini.

Melalui perspektif multidisiplin, buku ini mengulas berbagai aspek penting pembangunan Indonesia Emas 2045, mulai dari UMKM, generasi muda, lingkungan hidup, sistem informasi dan digitalisasi, ekonomi berkelanjutan, pertanian, ketahanan pangan, hingga kelautan dan sumber daya pesisir. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat satu pesan utama: bahwa masa depan Indonesia hanya dapat dibangun melalui strategi keselarasan antara kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan kelestarian ekosistem.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-259-0



9

786342

782590